



Penyampaian Pidato Bupati Terkait Raperda

Pertanggungjawaban APBD 2024

WTP Cerminan

Tata Kelola

Keuangan

Daerah Ketapang



PROKOPIM KETAPANG

SERAHKAN - Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir SH menyerahkan Pidato Bupati Ketapang mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada pimpinan DPRD Ketapang di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang, Selasa (10/6).



KETAPANG, SP - Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) ke-II secara berturut-turut, mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik serta merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Ketapang.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir SH ketika menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang sekaligus menyampaikan Pidato Bupati Ketapang mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Selasa (10/6) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang.

Dalam pidatonya, Wakil Bupati Jamhuri menegaskan bahwa penyampaian Raperda tersebut merupakan kewajiban konstitusional pemer-

intah daerah kepada DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

“Raperda ini disampaikan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Wakil Bupati Jamhuri mengungkapkan, berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Capaian ini menjadi yang ke-II kalinya secara berturut-turut.

“Ini mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik serta merupakan hasil kerja keras bersama antara

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Ketapang,” tegasnya.

Selain itu, BPK RI juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern. Pemerintah daerah diminta segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk perbaikan keuangan di masa mendatang.

Wakil Bupati Jamhuri menyampaikan bahwa penyusunan Raperda ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017, serta Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 dan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

“Raperda ini menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan selama tahun 2024 serta menjadi bentuk evaluasi akhir atas pelaksanaan APBD,” jelasnya. (teo/*)